



Peran Kepemimpinan Susi Pudjiastuti dalam Membangun Integritas dan Kemandirian Maritim Nasional

Nursyidah^{1*}, Ferika Clodya², M. Rizky Indrawan Saputra³, Junita Mawartina⁴,
Hetisarlina⁵, Dewi Yanti⁶

¹²³⁴⁵⁶ Ilmu Administrasi Negara / Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: nsyidah444@gmail.com, ferikacldya08@gmail.com,
rizky.indrawan.sya@gmail.com, junitamawartina16@gmail.com, hetisarlini530@gmail.com,
dewiyanti0960@gmail.com

Abstrak. *This study aims to analyze the leadership role of Susi Pudjiastuti in building integrity and maritime independence during her tenure as Indonesia's Minister of Marine Affairs and Fisheries from 2014 to 2019. Using a descriptive qualitative method through literature review and documentation of secondary sources, the research explores her leadership character, policies, and their impacts on Indonesia's maritime governance. The findings reveal that Susi Pudjiastuti implemented a transformational leadership style based on integrity, courage, and moral commitment. Her decisive policies, such as the sinking of foreign vessels involved in illegal fishing, reforming the fishing license system, and empowering local fishermen, strengthened Indonesia's maritime sovereignty and improved public trust in the government. Additionally, her initiatives in developing domestic fish processing industries promoted maritime self-reliance and sustainable economic growth. Despite facing controversies both domestically and internationally, Susi's firm and transparent leadership successfully restored Indonesia's maritime dignity on the global stage. This study concludes that leadership grounded in integrity, decisiveness, and independence serves as a vital foundation for achieving sustainable and sovereign maritime governance*
Keywords: *transformational leadership, integrity, maritime independence, public policy, Susi Pudjiastuti.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan Susi Pudjiastuti dalam membangun integritas dan kemandirian maritim nasional selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014–2019. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber sekunder seperti kebijakan resmi, artikel ilmiah, serta laporan media, penelitian ini menelaah bagaimana karakter kepemimpinan, kebijakan, serta dampak nyata dari gaya kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Susi Pudjiastuti menerapkan kepemimpinan berbasis integritas dan keberanian moral yang tercermin dalam kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*, reformasi sistem perizinan kapal, dan pemberdayaan nelayan lokal. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperkuat kedaulatan laut Indonesia, serta menumbuhkan kemandirian sektor perikanan domestik melalui pengembangan industri pengolahan hasil laut. Meskipun kebijakan yang diambil sering memunculkan kontroversi di tingkat nasional maupun internasional, ketegasan dan transparansi yang ditunjukkan Susi Pudjiastuti berhasil mengembalikan martabat maritim Indonesia di mata dunia. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan integritas, ketegasan, dan kemandirian merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan maritim yang berdaulat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *kepemimpinan transformasional, integritas, kemandirian maritim, kebijakan publik, Susi Pudjiastuti.*

PENDAHULUAN

Indonesia diidentifikasi sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau dan kawasan laut yang mencakup hampir dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya (Kiki Safitri, 2024). Keadaan geografi ini membuat sektor kelautan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan politik negara. Laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai

lambang identitas dan kedaulatan bangsa. Sayangnya, selama bertahun-tahun, potensi besar ini belum dimanfaatkan dengan maksimal akibat lemahnya pengelolaan pemerintahan di sektor kelautan serta perikanan. Berbagai masalah seperti praktik penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan, dan tidak teratur (IUU) serta eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan laut, bersama dengan rendahnya integritas dalam birokrasi perikanan menjadi hambatan berat bagi tercapainya kemandirian maritim nasional (PSDKP, 2025). Akibatnya, Indonesia kehilangan miliaran rupiah dalam potensi ekonomi setiap tahun dan menghadapi risiko terhadap kedaulatan wilayah lautan (Arbiansyah, 2025).

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2014 hingga 2019 muncul sebagai titik penting dalam sejarah perubahan kebijakan maritim Indonesia. Susi Pudjiastuti dikenal dengan cara memimpin yang tegas, tulus, dan berbeda dari yang biasa, serta fokus pada transformasi struktural yang signifikan. Pengalamannya sebagai pengusaha dan sosok di luar birokrasi membuatnya menjadi pemimpin yang mandiri dan berani mengambil langkah strategis, bahkan ketika langkah yang diambil bertentangan dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu (Balkis, 2020).

Salah satu langkah kebijakan yang paling mencolok yang menunjukkan ketegasan dan integritasnya adalah penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam pencurian ikan. Langkah ini bukan hanya sekedar tindakan simbolis, melainkan eksekusi konkret dari penegakan hukum di lautan yang menegaskan kedaulatan negara. Dalam studi yang dilakukan oleh Raharjo, 2021) kebijakan "Tenggelamkan!" yang diperkenalkan oleh Susi merupakan manifestasi dari sekuritisasi isu Penangkapan Ikan Secara Ilegal, sehingga menjadikannya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga persoalan keamanan nasional (Raharjo, 2021). Pendekatan ini berhasil mengubah cara pandang terhadap penegakan hukum di laut dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia internasional.

Selain penegakan hukum, Susi Pudjiastuti juga menekankan pentingnya integritas dan kemandirian dalam pengaturan maritim. Ia mendukung pengurangan kapal asing, memperketat proses pemberian izin, serta meningkatkan kemampuan nelayan lokal agar bisa bersaing di pasar nasional dan internasional (Anjeli et al., 2024). Kebijakan ini mencerminkan usahanya untuk menciptakan sistem kelautan yang mandiri, memiliki kedaulatan, dan adil secara sosial. Kepemimpinan Susi Pudjiastuti menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia saat ini. Karakter yang sejati, keberanian dalam menghadapi tekanan politik yang ada, serta keteguhan dalam memegang prinsip integritas membuatnya menjadi individu yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan kedaulatan di laut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana kepemimpinannya berperan dalam membangun integritas dan kemandirian maritim nasional, serta sejauh mana gaya kepemimpinannya dapat menjadi model bagi pembaruan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis karakter dan kebijakan, karena perhatian utama terletak pada pemahaman tentang cara kepemimpinan Susi Pudjiastuti serta pengaruhnya terhadap integritas dan kemandirian sektor maritim Indonesia, bukannya pada analisis statistik. Semua data yang dipergunakan sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, termasuk dokumen resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, regulasi menteri yang berkaitan dengan illegal fishing, artikel jurnal yang terakreditasi yang membahas kebijakan maritim di Indonesia, serta laporan media yang terpercaya seperti Kompas, Tempo, dan lain-lain, termasuk kutipan langsung dari pidato publik maupun wawancara Susi Pudjiastuti. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dokumentasi, yaitu pencarian sistematis terhadap dokumen-dokumen baik digital maupun cetak yang relevan. Semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi dengan cara mengategorikan informasi ke dalam tiga tema utama: integritas dalam kepemimpinan, upaya untuk memperkuat kemandirian maritim, serta tantangan dan kontroversi yang muncul dalam kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Susi Pudjiastuti adalah salah satu tokoh wanita Indonesia yang terkenal karena metode kepemimpinannya yang kuat, inovatif, dan fokus pada hasil yang nyata. Ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Meskipun berasal dari dunia nonbirokrasi, Susi berhasil menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kokoh dan efisien dalam mereformasi sektor kelautan dan perikanan. Metode kepemimpinannya sering kali disebut sebagai kepemimpinan transformasional yang menekankan pada perubahan yang sistemik, integritas moral, serta keberanian dalam mengambil keputusan strategis.

Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah tindakan tegas terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dengan cara menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan. Kebijakan ini telah menjadi simbol kedaulatan laut Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Anjeli et al., 2024). Susi dikenal atas keahlian komunikasinya yang efisien, baik dalam berkolaborasi dengan institusi lain maupun dalam menciptakan hubungan baik dengan komunitas nelayan. Melalui banyak platform publik dan jaringan sosial, ia berhasil menunjukkan citra seorang pemimpin yang terbuka dan berorientasi pada kepentingan bangsa (Hafni & Sutjipto, 2019).

Latar Belakang Sosial dan Karier

Susi Pudjiastuti dilahirkan di Pangandaran, Jawa Barat, pada tanggal 15 Januari 1965. Dia hanya menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat SMA, setelah itu dia memulai kariernya sebagai pengusaha dalam industri perikanan dengan mendirikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang fokus pada ekspor hasil laut. Dari kesuksesannya ini, dia memperluas usaha dengan meluncurkan Susi Air untuk mendukung distribusi hasil perikanan serta transportasi di wilayah-wilayah terpencil (Ini, 2020). Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, Susi memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan pejabat birokrasi lainnya. Dia terbiasa mengambil keputusan dengan cepat, mengambil risiko dengan berani, dan mengevaluasi kinerja berdasarkan hasil yang nyata, bukan hanya dari prosedur administratif. Ini menjadikannya seorang pemimpin yang pragmatis dan fleksibel, kontras dengan gaya kepemimpinan birokratis yang cenderung bersifat hierarkis (Ericssen, 2014). Kemandirian dan pengalaman yang dimilikinya di sektor swasta membangun karakter kepemimpinannya yang otonom dan sulit dipengaruhi oleh

kepentingan politik. Dengan pendekatan ini, Susi dapat melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif, khususnya dalam pengaturan izin kapal dan pengelolaan sumber daya laut (Rafiudin, 2023).

Karakteristik Pribadi

Susi diakui dengan karakter yang kuat dan autentik. Ia menolak segala bentuk kompromi terkait pelanggaran hukum dan menunjukkan ketegasan terhadap para pelaku penangkapan ikan yang tidak sah. Tindakan seperti menenggelamkan kapal bukan hanya sekadar simbol ketegasan, tetapi juga pernyataan politik bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas lautnya. Di samping itu, ia memiliki sifat yang dekat dengan masyarakat dan komunikatif. Susi terlibat aktif berinteraksi dengan masyarakat di platform media sosial dan lewat kampanye publik, termasuk program “Ayo Makan Ikan” yang bertujuan untuk mendorong konsumsi ikan di dalam negeri. Hal ini mencerminkan gaya komunikasi yang terbuka dan efisien dalam membangun kepercayaan masyarakat (Hafni & Sutjipto, 2019). Namun, pendekatannya yang tegas tidak jarang memunculkan kontroversi. Beberapa pihak menganggap kebijakan yang diambilnya terlalu keras dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara lain. Meskipun begitu, komitmennya untuk mempertahankan prinsip dan kedaulatan Indonesia tetap membuatnya dihormati, baik di tanah air maupun di kancah internasional.

Susi Pudjiastuti dikenal memiliki komitmen yang kuat terhadap penghentian korupsi. Ia dengan tegas menyebutkan bahwa korupsi adalah musuh utama yang dihadapi bangsa, dan berusaha untuk menjaga kejujuran di kementerian yang ia pimpin (F, 2025). Selain itu, Susi sering kali menghadapi tantangan politik dan lobi dari luar negeri, terutama dari mereka yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Namun, dia tetap teguh pada prinsip hukum dan kedaulatan suatu negara, bahkan saat kebijakan yang diambilnya memicu perdebatan di skala internasional. Sikapnya yang mandiri dan keberaniannya dalam mempertahankan pilihannya menunjukkan bahwa integritas merupakan dasar utama dalam setiap langkah kebijakan yang diambilnya. Tipe kepemimpinan semacam ini tidak hanya menguatkan kedaulatan maritim Indonesia, tetapi juga meningkatkan rasa percaya rakyat terhadap pemerintah yang transparan dan berintegritas.

Kebijakan terhadap kapal penangkapan ikan ilegal menimbulkan permasalahan.

Susi Pudjiastuti, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai kebijakan yang hebat dan merupakan tanda kejujuran dan kekuatannya. Dia membuat kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) tenggelam. Kebijakan ini lahir dari paradigma baru bahwa kedaulatan maritim Indonesia tidak hanya diukur dari kemampuan militer, namun juga penegakan hukum terhadap pelanggaran ekonomi di laut. (Nurul Istiqomah, 2019) mempelajari bagaimana Indonesia menerapkan kebijakan untuk menghentikan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal pada tahun 2014-2019. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut mengikuti tiga gagasan utama: Indonesia mempunyai hak untuk mengontrol perairannya, Indonesia ingin melindungi sumber daya lautnya untuk masa depan, dan Indonesia ingin mendapatkan keuntungan dari industri perikanannya. Ketika suatu negara menenggelamkan kapal yang melanggar aturan, hal itu menunjukkan bahwa negara tersebut serius dalam melindungi tanah dan sumber dayanya dari negara lain yang tidak mematuhi aturan. Kebijakan ini membantu melindungi lingkungan dan ikan dengan menghentikan penangkapan ikan ilegal dan membiarkan populasi ikan bertambah kembali. Hal ini menemukan bahwa ketika kebijakan ini diberlakukan, produksi ikan di negara tersebut meningkat dan nelayan setempat menghasilkan lebih banyak uang. Hal ini terjadi karena kondisi ikan di perairan Indonesia mulai membaik.

(Maskur et al., 2021) melakukan penelitian lain yang berjudul Efektivitas Peneggelaman Kapal Illegal Fishing dalam Peningkatan Pendapatan Nelayan Lokal, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini membantu nelayan tradisional, terutama yang tinggal di dekat laut, untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sebelumnya, ikan yang ditangkap nelayan lokal tidak sebanyak dulu karena kapal asing yang datang menangkap ikan menggunakan peralatan jelek sehingga merugikan ikan. Kebijakan yang membuat kapal tenggelam lebih aman membuat wilayah penangkapan ikan menjadi lebih baik dan nelayan menangkap lebih banyak ikan.

(Pangestu, 2022) menulis dalam jurnal Kebijakan Hukum Peneggelaman Kapal Illegal Fishing dalam Melindungi Sumber Daya Laut di Indonesia bahwa kebijakan ini penting baik karena alasan hukum maupun lingkungan. Hal ini membantu menegakkan hukum dan melindungi sumber daya laut. Tindakan tegas ini menghentikan terjadinya hal-hal buruk dan menunjukkan kepada negara lain bahwa Indonesia sangat serius dalam menjaga wilayah lautnya. Kebijakan ini juga menimbulkan masalah bagi diplomasi karena beberapa negara pemilik kapal yang tenggelam menyatakan tidak senang dengan hal tersebut. Kebijakan tersebut juga dipertahankan oleh Susi Pudjiastuti, mengikuti undang-undang yang menyatakan demikian (UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penangkapan Ikan). Ia menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan jujur dengan tidak berubah pikiran atau menyerah pada tekanan negara lain.

(Kusuma & Aryani, 2023) dalam Kebijakan Peneggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing di Indonesia dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menemukan bahwa kebijakan ini mengikuti gagasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-14 “Kehidupan di Bawah Air”. Kebijakan ini membantu laut dan makhluk hidup di dalamnya dengan menghentikan hal-hal buruk seperti membunuh atau mengambil terlalu banyak hewan. Hal ini juga memastikan bahwa masyarakat mengikuti aturan dan tidak melakukan kesalahan apa pun. Kebijakan peneggelaman kapal-kapal yang terlibat perompakan bukan hanya sekedar tindakan hukum, namun juga merupakan alat moral dan tanda penghormatan dan kewibawaan pemerintah Indonesia terhadap negara dan masyarakatnya di laut.

Transparansi Perizinan Kapal dan Pemberantasan Mafia Perikanan.

Susi Pudjiastuti jujur dan adil dalam berupaya memperbaiki sistem perizinan kapal ikan. Sistem ini sudah lama tidak adil dan tidak jujur serta merugikan masyarakat yang bekerja di sektor maritim. Sistem izin penangkapan ikan tidak adil sebelum dia menjadi pemimpin. Beberapa orang yang berkuasa, seperti pemilik usaha besar dan politisi, memiliki terlalu banyak kendali atas siapa yang bisa mendapatkan izin penangkapan ikan. Situasi ini menjadikan tidak adil bagi nelayan kecil dan perusahaan besar yang memiliki sebagian besar kapal.

Susi Pudjiastuti melakukan perubahan besar dengan memastikan bahwa masyarakat yang menangkap ikan harus mengikuti aturan dan menyingkirkan orang-orang jahat yang menguasai industri perikanan. Dia memperketat aturan untuk mendapatkan izin dan memeriksa semua surat yang menyatakan kapal boleh berlayar di Indonesia. Ia lebih memperhatikan kapal-kapal dari negara lain. (Azhar et al., 2018) menemukan bahwa ketika perusahaan besar mendapatkan izin penangkapan ikan, seringkali mereka tidak peduli dengan nelayan kecil yang sudah lama melaut. Hal ini membuat para nelayan kecil kehilangan hak dan uang yang mereka peroleh dari melaut. Susi menunjukkan integritas kepemimpinannya dengan berupaya memperbaiki sistem perizinan demi keadilan sosial.

(Nasution & Wicaksono, 2023) Kajian Ekonomi Politik Pembangunan Perikanan Pada Rezim Joko Widodo menunjukkan bahwa kebijakan Susi yang mengubah izin penangkapan ikan mengubah cara sektor perikanan dijalankan oleh orang-orang berkuasa. Beberapa kelompok yang

ingin mempengaruhi keputusan seperti perusahaan besar dan pemimpin kota tidak senang dengan peraturan yang membatasi cara mereka berbicara satu sama lain. Tindakan pemerintah pada langkah ini membuat masyarakat semakin percaya, karena mereka jujur, terampil dan bertanggung jawab dalam mengelola sektor perikanan. Susi Pudjiastuti menyatakan akan melawan izin penangkapan ikan ilegal, penyelundupan makanan laut, dan korupsi ekspor dan impor produk perikanan. Ia menunjukkan keberaniannya dengan menghentikan kapal asing menangkap ikan dan memeriksa perusahaan perikanan pada tahun 2015. Tindakan ini membuat masyarakat menentang pemerintah, namun menunjukkan bahwa pemimpin yang jujur dan berani harus membela apa yang benar bagi negara, meskipun itu berarti bertentangan dengan kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah pandai dalam mengatur, terutama dengan bersikap terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat. Reformasi sistem perizinan mempersulit masyarakat untuk berbuat curang dan menyalahgunakan kekuasaan mereka, membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memeriksa diri, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempunyai lebih banyak hak untuk menentukan bagaimana kebijakan maritim dibuat. Integritas berarti lebih dari sekedar apa yang dipikirkan atau dilakukan seseorang. Hal ini juga berarti memiliki seperangkat aturan yang jujur, jelas, dan baik untuk semua orang.

Perlindungan nelayan lokal dan penguatan industri perikanan domestik

Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti menempatkan prioritas pada pemulihan kedaulatan sumber daya perikanan bagi nelayan lokal melalui kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penangkapan ikan ilegal (IUU fishing). Langkah paling dikenal adalah pelarangan transshipment ilegal dan kebijakan penghancuran/sink atau pemusnahan kapal asing yang tertangkap melakukan IUU fishing kebijakan ini bukan sekedar simbol, melainkan upaya untuk mengurangi tekanan penangkapan oleh armada asing dan memberi ruang bagi stok ikan pulih sehingga nelayan lokal memperoleh kuota tangkapan yang lebih adil. Beberapa kajian hukum dan kebijakan menilai bahwa tindakan tegas ini efektif dalam meningkatkan persepsi pengamanan wilayah laut Indonesia dan menurunkan praktek penangkapan ilegal, meski menimbulkan perdebatan tentang prosedur hukum dan implikasi diplomatik. Selain itu, Susi mendorong moratorium izin kapal penangkap ikan asing dan pengaturan ulang izin usaha, yang secara langsung memperkuat posisi nelayan nasional dan memperkecil dominasi kapal asing terhadap perairan Indonesia (Alfi & Manullang, 2024).

Pengembangan industri pengolahan hasil laut

Di samping penegakan hukum, Susi menekankan bahwa kemandirian maritim tidak cukup dengan hanya menjaga stok ikan. Indonesia juga harus memperkuat rantai nilai domestik melalui hilirisasi produk perikanan. Ia sering mengkritik kenyataan bahwa produk olahan perikanan bernilai tambah tinggi dikuasai negara tetangga, sehingga Indonesia banyak mengeksport bahan mentah ikan dan hasil tangkapan ketimbang produk olahan bernilai tambah tinggi. Untuk itu, kebijakan kementeriannya mendorong pembatasan praktik bongkar muat di tengah laut dalam rangka untuk mencegah transshipment yang menguntungkan pengusaha asing, aturan ekspor bahan mentah tertentu, serta insentif dan pengawasan terhadap unit pengolahan di dalam negeri semua upaya itu bertujuan meningkatkan kapasitas industri pengolahan lokal, memperpanjang rantai nilai di dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja bagi nelayan dan pelaku usaha kecil-menengah (Regina Pati Nababan & Fachru Nofrian, 2025).

Diplomasi maritim di forum internasional

Peran Susi juga meluas ke ranah diplomasi maritim, kebijakan domestik tegas yang dilakukan KKP di bawah kepemimpinannya turut membentuk posisi tawar Indonesia dalam dialog regional dan internasional mengenai IUU fishing, tata kelola perikanan, dan hak kedaulatan maritim. Langkah-langkah domestik seperti penenggelaman kapal dan pengetatan izin dikomunikasikan sebagai upaya memenuhi kewajiban pengelolaan sumber daya kelautan dan sebagai argumen kuat ketika Indonesia bernegosiasi tentang patroli bersama, kerjasama pengawasan perbatasan, dan harmonisasi aturan perikanan di tingkat regional. Selain itu, wacana dan tindakan terkait penamaan kawasan laut serta keterlibatan Indonesia dalam mekanisme ASEAN / Indo-Pacific memberi ruang diplomasi untuk menegaskan kepentingan kedaulatan maritim dan keamanan sumber daya (Kuncoro, 2020). Kajian tentang diplomasi maritim Indonesia mencatat bahwa kombinasi antara kebijakan domestik yang tegas dan diplomasi konstruktif membuat negara lebih mampu menggalang kerja sama teknis, pertukaran informasi patroli, dan dukungan internasional terhadap inisiatif penanggulangan IUU, sekaligus meningkatkan legitimasi langkah-langkah protektif Indonesia di mata mitra internasional.

Analisis Dampak Kepemimpinan

Kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia 2014-2019 menjadi contoh kepemimpinan yang menonjol dalam sejarah pemerintahan modern tanah air, menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang memiliki visi tegas dapat membangun integritas dan kemandirian sektor maritim nasional. Dengan latar belakang bukan birokrat dan pengalaman langsung di sektor perikanan serta penerbangan, Susi pudjiastuti mempraktikkan pendekatan kepemimpinan yang inovatif dan transformasional. Ia tidak ragu mengambil langkah-langkah besar yang sering kali tidak disukai, namun didasarkan pada kepentingan jangka panjang negara, seperti kebijakan menghancurkan kapal asing yang terlibat pencurian ikan, moratorium izin untuk kapal asing, pelarangan transshipment di lautan, serta pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan laut.

Dalam hal integritas maritim nasional, kepemimpinan Susi pudjiastuti membawa dampak yang berarti. Ia berhasil memperkuat penegakan hukum di bidang kelautan dengan tindakan tegas terhadap praktik pencurian ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing) yang telah menjadi ancaman bagi kedaulatan laut Indonesia selama bertahun-tahun. Kebijakan untuk menenggelamkan kapal asing tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi simbol dari penegakan hukum tanpa kompromi. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan transparansi informasi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan maritim kepada publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sary, 2020). Reformasi yang diprakarsai Susi juga menutup berbagai celah birokrasi yang selama ini menjadi sumber penyimpangan serta korupsi dalam sektor perikanan.

Di sisi kemandirian maritim nasional, Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Kebijakan moratorium terhadap kapal asing dan penguatan kapasitas nelayan lokal mendukung pemulihan kontrol Indonesia terhadap sumber daya lautnya. Pemberdayaan terhadap nelayan kecil, pembangunan kapal secara lokal, serta pengembangan industri pengolahan hasil laut domestik memperkuat dasar ekonomi maritim nasional. Kebijakan pelestarian laut dan larangan terhadap metode tangkap yang merusak juga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, yang merupakan syarat untuk mencapai kemandirian ekonomi jangka panjang.

Namun, keberanian dan ketegasan Susi tidak bebas dari tantangan. Beberapa kebijakannya, seperti pelarangan cantrang dan transshipment, menghadapi perlawanan dari nelayan tradisional yang merasa tertekan secara ekonomi. Selain itu, efisiensi kebijakan penegakan hukum di perairan masih dihadapkan pada kekurangan sumber daya manusia, masalah logistik, dan infrastruktur pengawasan yang terbatas. Meski demikian, secara keseluruhan, kepemimpinan Susi Pudjiastuti berhasil mengembalikan kehormatan maritim Indonesia di kancah internasional, menegaskan kedaulatan laut, dan menanamkan nilai integritas serta kemandirian yang kuat dalam pengelolaan sumber daya kelautan nasional (Itsfer, 2021).

Dampak positif dari kebijakan moratorium untuk kapal eks asing yang diberlakukan sejak 14 November 2014 tercermin dalam data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam periode Januari-April 2015, sektor perikanan Indonesia mengalami peningkatan produksi yang mencapai 50,32 juta ton, jauh melampaui capaian periode yang sama pada tahun 2013 dan 2014. Peningkatan produktivitas ini terjadi di saat ekonomi nasional justru mengalami perlambatan, dengan sektor perikanan mencatatkan pertumbuhan dari 7,46% pada periode 2014 menjadi 8,64% di tahun berikutnya. Pencapaian ini menunjukkan resiliensi sektor perikanan di tengah tantangan ekonomi makro (Anjani et al., 2025). Kepemimpinan Susi memberikan pelajaran berharga bahwa integritas dan kemandirian nasional di bidang maritim hanya bisa dicapai melalui kombinasi visi strategis, keberanian moral, transparansi publik, serta pengembangan kapasitas lokal. Meskipun masa jabatannya telah berakhir, warisan kepemimpinan yang ditinggalkannya tetap menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan maritim yang berdaulat, berkelanjutan, dan adil di masa depan Indonesia.

Tantangan dan Kontroversi dalam Kepemimpinan Maritim Susi Pudjiastuti

Kebijakan penenggelaman kapal yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa “penenggelaman kapal adalah bentuk kedaulatan dan penegakan hukum yang tidak bisa ditawar” secara luas dipandang sebagai langkah tegas dalam menegaskan kedaulatan maritim Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal merupakan langkah paling ikonik sekaligus paling kontroversial dari masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Kebijakan penegakan hukum oleh Susi Pudjiastuti tersebut, untuk menegaskan kedaulatan maritim dan memberikan efek jera terhadap praktik *Illegal Fishing, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* (Hassapni & Kurniawan, 2020). Tidak hanya menghadapi perlawanan dari pelaku asing tetapi juga sebagian pengusaha perikanan nasional. Sejumlah asosiasi usaha menilai pendekatan tersebut terlalu represif dan tidak memberikan ruang adaptasi bagi industri. Sebagian pengusaha domestik merasa kebijakan tersebut “mematikan iklim usaha” karena proses perizinan diperketat dan sejumlah kapal eks-asing yang sebelumnya beroperasi secara semi-ilegal dipaksa berhenti beroperasi. Di satu sisi, kebijakan tersebut efektif sebagai *shock therapy* yang berhasil menurunkan aktivitas penangkapan ikan ilegal secara signifikan, bahkan menarik perhatian dunia internasional karena dianggap merepresentasikan kebangkitan kedaulatan maritim Indonesia (Arto et al., 2020).

Namun sejumlah analis ekonomi berargumen bahwa kapal-kapal yang disita seharusnya tidak dimusnahkan, melainkan dialihfungsikan untuk keperluan riset, pelatihan, atau koperasi nelayan lokal juga pariwisata bawah laut. Kapal-kapal asing yang menjadi aset negara dapat dilelang atau dialihfungsikan untuk kepentingan nelayan lokal. Di sisi lain, kekhawatiran lingkungan juga timbul, terutama terkait dampak bangkai kapal terhadap kualitas perairan dan ekosistem dasar lautnya. Perdebatan ini memperlihatkan dilema klasik antara *justice retributive* dan *economic-utilitarian approach*, yang hingga kini belum menemukan titik tengah dalam

kebijakan maritim nasional. Sejumlah kajian ekonomi perikanan menunjukkan bahwa praktik pemusnahan kapal secara besar-besaran berpotensi menciptakan *economic waste* jika tidak diikuti dengan skema pemanfaatan ulang atau perhitungan kompensasi kerugian secara komprehensif.

Implementasi kebijakan penenggelaman kapal juga memunculkan resistensi dari pengusaha perikanan dalam negeri maupun negara tetangga yang merasa dirugikan. Beberapa Sektor industri perikanan skala besar menilai kebijakan moratorium kapal eks-asing dan pembatasan izin tangkap menghambat aktivitas produksi dan menurunkan ekspor (Karim, 2020). Di sisi lain, sejumlah negara seperti Vietnam dan Tiongkok secara diplomatis menyampaikan keberatan terhadap praktik penenggelaman kapal, bahkan beberapa kali meminta agar mekanisme penegakan hukum ditempuh melalui jalur persuasif atau repatriasi kapal, bukan destruksi fisik. Kendati demikian, Susi tetap konsisten dengan prinsip penegakan hukum di laut, menegaskan bahwa “kedaulatan tidak untuk dijual.” Susi Pudjiastuti berargumen bahwa ketegasan adalah satu-satunya bahasa yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing* yang selama ini memanfaatkan celah lemahnya pengawasan laut Indonesia. Resistensi ini menunjukkan bahwa kebijakan berlandaskan integritas sering kali berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek, baik dari aktor domestik maupun internasional.

Selain pada kebijakannya, gaya komunikasi publik Susi Pudjiastuti juga menjadi sebuah kontroversi tersendiri. Di satu sisi, gaya komunikasinya yang lugas, emosional, dan terkadang konfrontatif dinilai berhasil membangun citra kepemimpinan yang autentik dan berani, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam isu kedaulatan maritim. Namun, sejumlah kalangan birokrat dan diplomat menilai bahwa gaya komunikasi tersebut kerap dianggap tidak diplomatis dan berpotensi menimbulkan ketegangan politik, terutama ketika disampaikan di forum internasional (Sary, 2020). Meski demikian, pendekatan komunikasi yang tidak normatif ini justru menjadikan isu *illegal fishing* mendapat perhatian luas dari masyarakat, media, hingga institusi internasional seperti FAO, yang kemudian memberi Indonesia penghargaan atas keberhasilan memberantas praktik penangkapan ikan ilegal. Dengan demikian, polemik gaya komunikasi Susi menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis integritas tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan substantif, tetapi juga melalui kemampuan membentuk persepsi publik terhadap nilai kedaulatan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014–2019 merupakan contoh nyata dari model kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada integritas, keberanian moral, dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Melalui gaya kepemimpinan yang tegas dan inovatif, Susi berhasil menegakkan kembali kedaulatan laut Indonesia serta memperkuat tata kelola sektor maritim yang selama ini lemah akibat praktik birokrasi dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* menjadi simbol ketegasan hukum yang berdampak signifikan terhadap pengurangan praktik pencurian ikan dan peningkatan pendapatan nelayan lokal. Reformasi sistem perizinan kapal dan pemberantasan mafia perikanan menunjukkan upaya serius dalam mewujudkan transparansi birokrasi dan keadilan bagi nelayan kecil. Selain itu, Susi juga berhasil mendorong kemandirian ekonomi maritim melalui pengembangan industri pengolahan hasil laut di dalam negeri dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Namun, berbagai kebijakan tegas yang diambil juga menimbulkan tantangan dan resistensi, baik dari pengusaha nasional maupun negara asing yang merasa dirugikan. Beberapa kebijakan seperti pelarangan *cantrang* dan moratorium kapal asing memunculkan dilema antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan sumber daya jangka panjang. Meski demikian, kepemimpinan Susi Pudjiastuti telah berhasil menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan nasionalisme dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip moral dan keberanian dapat memperkuat kedaulatan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan pada analisis pada penelitian ini, disarankan agar pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan semangat reformasi maritim yang telah dirintis oleh Susi Pudjiastuti dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, nelayan, dan pelaku industri. Peningkatan kapasitas nelayan lokal, investasi dalam teknologi pengawasan laut, serta pengembangan industri hilir perikanan domestik perlu terus dilakukan agar kemandirian maritim dapat terwujud secara berkelanjutan. Selain itu, pendekatan komunikasi publik yang partisipatif dan edukatif juga penting untuk mengurangi resistensi sosial terhadap kebijakan tegas di sektor perikanan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas kebijakan pasca-era Susi Pudjiastuti guna menilai sejauh mana prinsip integritas dan kemandirian tetap terjaga dalam tata kelola maritim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, R., & Manullang, A. J. (2024). Melindungi Nadi Bangsa: Upaya Indonesia dalam Mencapai Keamanan Maritim dan Keberlanjutan pada Tataran Global. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 6(2), 303–324. <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i2.49655>
- Anjani, A. T., Zakira, A., Afriyani, R., Hanoselina, Y., & Syafril, R. (2025). Gaya Kepemimpinan Transformasional Susi Pudjiastuti : Revolusi Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia (2014-2019) Transformational Leadership Style of Susi Pudjiastuti : A Governance Revolution in Indonesia ' s Marine and Fisheries Sector (. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 10874–10889.
- Anjeli, S. M., Yulendra, F. D., Apriadi, I., Pardede, V., & Akbar, M. H. Al. (2024). Menyoroti Gaya Kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti Di Era Modern. *Retorika Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, 1(2), 16–25.
- Arbiansyah, Z. (2025). *Analisis terhadap kepemimpinan susi pudjiastuti dalam penataan kebijakan kelautan Indonesia*. June.
- Arto, R. S., Yudho Prakoso, L., & Sianturi, D. (2020). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi Indonesia'S Deep Marine Defense Strategy Maritime'S Perspective Facing Globalization. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(February), 209–230. <https://www.gesuri.id/analisis/>
- Azhar, M., Suhartoyo, S., Alw, L. T., Suharso, P., & Herawati, V. E. (2018). Protection of traditional fishermen in the granting of fishery licenses in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 47(January). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184707003>

- Balkis, A. H. (2020). Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Instansi Publik: Studi Kasus Susi Pudjiastuti. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 79–88. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2271>
- Ericssen. (2014). *Susi Pudjiastuti, Si Pekerja Keras yang Memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan*. NATIONAL GEOGRAPHIC INDONESIA. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13294961/susi-pudjiastuti-si-pekerja-keras-yang-memimpin-kementerian-kelautan-dan-perikanan?.com>
- F, Y. (2025). *Susi Pudjiastuti Sentil Logika Zulkifli Hasan Tentang Kemiskinan: Musuh Utama Kita Korupsi!* Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2025/08/12/124242/susi-pudjiastuti-sentil-logika-zulkifli-hasan-tentang-kemiskinan-musuh-utama-kita-korupsi?.com>
- Hafni, R. D., & Sutjipto, V. W. (2019). Faktor-Faktor Komunikasi Persuasif Susi Pudjiastuti Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Untuk Mengonsumsi Ikan. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 3(2), 117–125.
- Hassapni, W., & Kurniawan, R. (2020). Kajian Kebijakan Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Dengan Discourse Network Analysis. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 49–58. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.115>
- Ini, B. H. (2020). *Profil Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Kumparan TEACH. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/profil-susi-pudjiastuti-mantan-menteri-kelautan-dan-perikanan-indonesia-1uel82ZCvIh/full?.com>
- Itsfer. (2021). *Susi Pudjiastuti: ITS Perlu Berkontribusi Lebih Banyak Majukan Dunia Maritim*. ITS News. <https://www.its.ac.id/news/2021/11/24/susi-pudjiastuti-its-perlu-berkontribusi-lebih-banyak-majukan-dunia-maritim/?.com>
- Karim, M. (2020). Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.24198/jaki.v5i1.26453>
- Kiki Safitri, A. R. (2024). *Jumlahnya Bertambah, Ada 17.380 Pulau di Indonesia pada 2024*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/12/12002541/jumlahnya-bertambah-ada-17380-pulau-di-indonesia-pada-2024>
- Kuncoro, H. (2020). Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(1), 100–101. <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/download/55/43>
- Kusuma, B. T., & Aryani, M. I. (2023). Kebijakan Peneggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing di Indonesia dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Global and Policy Journal of International Relations*, 11(01), 1–14. <https://doi.org/10.33005/jgp.v11i01.4174>
- Maskur, M. A., Masyhar, A., Kusuma, B. H., & Widyawati, A. (2021). Effectiveness of Ship Sinking of Illegal Fishing in Term of the Improvement of Local Fishermen Income. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 6(2), 141–152. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i2.33915>

- Nasution, A. M., & Wicaksono, V. A. (2023). The Political Economy of Fisheries Development During Joko Widodo's Regime. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 141–164. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.141-164>
- Nurul Istiqomah, Y. (2019). *Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Indonesia pada Tahun 2014 - 2019*.
- Pangestu, A. T. (2022). Legal Policy of Illegal Fishing Ship Sinking Policy in Protecting Marine Resources in Indonesia Politik. *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia*, Vol. 12, N(Konflik Ukraina-Rusia), 39–48. <https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>
- PSDKP, H. D. (2025). *KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp774,3 M Imbas Illegal Fishing Periode Januari-Mei 2025*. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-rp7743-m-imb-ilegal-fishing-periode-januari-mei-2025-57EX.html?com>
- Rafiudin, M. (2023). *Profil Singkat Susi Pudjiastuti: Pengusaha Sukses dan Menteri Kelautan yang Berdedikasi*. KILAT.COM. <https://www.kilat.com/nasional/8449135417/profil-singkat-susi-pudjiastuti-pengusaha-sukses-dan-menteri-kelautan-yang-berdedikasi?.com>
- Raharjo, W. A. (2021). Tenggelamkan!: Susi Pudjiastuti's Securitization of IUUF in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8858>
- Regina Pati Nababan & Fachru Nofrian. (2025). ANALISIS HILIRISASI PERIKANAN DI INDONESIA. *Jurnal Of Development Economic And Digitalization*, 4(1), 31–45.
- Sary, A. (2020). *Media Sosial untuk Susi Pudjiastuti Bangun Keamanan Maritim Kesadaran di Indonesia*. 6(2), 98–115.